**KOMPETENSI INKLUSI PAJAK DI PERGURUAN TINGGI: DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRAKTISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Nyoman Trisna Herawati  Universitas Pendidikan Ganesha  [trisnaherawati@undiksha.ac.id](mailto:trisnaherawati@undiksha.ac.id) | I Nyoman Putra Yasa  Universitas Pendidikan Ganesha  putrayasainym@undiksha.ac.id |
| Sunitha Devi  Universitas Pendidikan Ganesha  [sunitha.devi@undiksha.ac.id](mailto:sunitha.devi@undiksha.ac.id) | Made Ary Meitriana  Universitas Pendidikan Ganesha  ary.meitriana80@gmail.com |

Abstract

Early tax awareness is needed to increase state revenue especially those from the tax sector. One of the programs is the application of tax inclusion in higher education institutions. However in reality, students' understanding of taxes is still low. For this reason, the purpose of this study is to analyze the competencies needed to increase tax inclusion in students and their applicability in learning at higher education institutions. The research method used a quantitative method with ex post facto approach through two analytical tools, namely (1) testing the validity and reliability of the instrument with the Rasch Model and (2) quantitative descriptive. The research respondents were tax practitioners with 30 respondents consisting of consultants and lecturers. Data collected by questionnaire through likert scale dan open question. The results showed that the competencies most needed to increase tax inclusion for students were tax compliance procedures starting from the list, count, pay and report. Seen from the perspective of tax practitioners 76% of respondents agreed that the application of tax inclusion was given to individual subjects, 12% were integrated into MKWU and the rest about 12% respondent were not given in the form of courses, but other academic activities such as seminars or tax training. Than, they suggest the institution provide a balanced understanding of theory and practice in the field of taxation

Key words : competencies, tax inclusion, tax practitioners

**1. Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu andalan penerimaan negara. Di Indonesia sebesar 74,6% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Badan dan pihak lainnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan dalam hal ini termasuk gaji dan tunjangan pegawai, proyek pembangunan, subsidi, pembayaran utang, bantuan sosial dan pengeluaran negara lainnya. Hal inilah yang menyebabkan peran pajak dalam pembangunan memegang arti yang sangat penting. Berdasarkan Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah wajib pajak (WP) pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang erat kaitannya dengan penerimaan pajak (News.ddtc.co.id, 2019).

Meskipun terdapat peningkatan jumlah wajib pajak, namun tantangan penerimaan pajak menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 tidak dapat mencapai terget yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari DJP, jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun 2019 sebanyak 13,37 juta . Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total wajib pajak yang wajib melaporkan SPTnya yaitu sebanyak 18,33 juta. Capaian ini berada di bawah target yang dipatok pemerintah yaitu 80%. Sementara itu jika dirinci, realisasi kepatuhan formal WP badan hanya mencapai 65,28%, sedangkan kepatuhan WP orang pribadi (OP) karyawan dan non karyawan masing-masing sebesar 73,2% dan 75,31% (News.ddtc.co.id, 2020). Hal ini menyebabkan target penerimaan negara melalui sektor pajak sering kali tidak tercapai. Hal ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya keras dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, agar target penerimaan pajak di masa yang akan datang dapat direalisasikan dengan lebih mudah.

Program inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, khususnya calon pembayar/wajib pajak, melalui penyisipan materi perpajakan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan paling rendah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Agar program inklusi kesadaran pajak ini dapat mencapai tepat sasaran, maka program ini harus disusun secara sistematis, terukur dan masif. Sistematis maksudnya bahwa program inklusi kesadaran pajak ini harus ada payung hukum yang kuat dan jelas, serta terencana dengan rapi dan berjenjang mulai dari tingkat pendidikan paling rendah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi. Sehingga ada panduan dan pedoman serta acuan bagi pihak instansi Dirjen Pajak khususnya maupun bagi pemangku kepentingan yang lain dalam menjalankan program tersebut. Dengan demikian diharapkan mulai dari tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sampai tingkat unit kerja paling depan mempunyai persepsi, strategi maupun kegiatan yang relatif sama. Selain jadi pedoman dan panduan, payung hukum tersebut juga sebagai hukum positif yang harus dijalankan oleh semua pihak yang terkait, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Setelah ada payung hukum yang kuat dan jelas, serta telah disusun rencana program yang sistematis yang dapat mengikat semua stakeholder, selanjutnya program inklusi kesadaran pajak  ini harus terukur artinya bahwa materi maupun kegiatan inklusi kesadaran pajak ini harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing sasaran. Materi inklusi kesadaran pajak tingkat Taman Kanak-Kanak berbeda dengan materi inklusi tingkat Sekolah Dasar. Begitu juga materi inklusi untuk tingkat Sekolah Dasar akan berbeda dengan materi inklusi tingkat Sekolah Menegah Pertama, dan seterusnya (Setiono, 2019)

Penerapan inklusi pajak di perguruan tinggi dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DJPK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI tentang peningkatan kesadaran pajak melalui pembelajaran dan kemahasiswaan di pendidikan tinggi. Inklusi pajak pada pendidikan tinggi terutama inklusi sikap sadar pajak dilakukan dengan menyusun muatan materi kesadaran pajak dalam mata kuliah wajib umum (MKU) di perguruan tinggi antara lain: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Agama. Inklusi pajak di perguruan tinggi penting diberikan agar para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki karakter kuat yang dapat dilihat dari tumbuhkan kesadaran pajak yang merupakan bagian dari bentuk bela negara (Edukasi.pajak.go.id, 2016a).

Namun, di lapangan penerapan inklusi pajak di PT belum dapat dikatakan optimal. Salah satu alasannya, karena memang program studi di masing-masing perguruan tinggi memiliki otonomi tersediri dalam menyusun kurikulumnya yang mengacu pada standar KKNI. Hal ini berdampak pada, komponen materi dalam kurikulum belum menyentuh mahasiswa yang berasal dari fakultas non-ekonomi. Bagi mahasiswa yang berasal dari fakultas ekonomi, maka materi perpajakan sudah diperoleh dalam kurikulumnya. Hal ini menunjukkan diperlukannya sinergitas dosen, mahasiswa, dan praktisi di bidang perpajakan untuk mengembangkan kurikulum yang mampu memberikan pengalaman belajar baik secara ideal, instruksional, maupun secara eksperensial dalam bidang perpajakan untuk semua mahasiswa. Hal ini diharapkan nantinya setelah menamatkan studi, mahasiswa memiliki pemahaman akan perpajakan sehingga padaa saat memperoleh penghasilan mampu menjadi wajib pajak yang patuh akan kewajibannya.

Kurang optimalnya pembelajaran inklusi keuangan di PT menyebabkan pemahaman mahasiswa tentang pajak masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mahasiswa belum dapat dikatakan optimal. Ini ditunjukkan dari pemahaman mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, regulasi dan mekanisme pembayaran pajak, jenis-jenis pajak, hingga penyelewengan pajak masih rendah. Namun persepsi mahasiswa bahwa pajak itu memiliki peran yang penting bagi negara sudah tergolong baik (Dianastiti, Novitasari, & Wati, 2020). Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh (Anggaraeni, Septian, & Kristanto, 2019) yang menyebutkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajaknya disebabkan karena pemahaman akan pajak yang masih sangat rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berupaya menggagas sebuah ide model pembelajaran inklusi pajak di perguruan tinggi.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mencetak tenaga kependidikan maupun non kependidikan. Saat ini, Undiksha belum mengadaptasi program inklusi pajak dalam mata kuliah MKU, namun demikian pada tahun 2020 Undiksha menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan peluang kepada setiap mahasiswa untuk shopping mata kuliah atau mengambil mata kuliah lain di luar program studi, sesuai dengan Permendikbud No.3 tahun 2020. Sehingga ini, merupakan peluang untuk menciptakan sebuah mata kuliah tersendiri yang mampu meningkatkan inklusi pajak pada mahasiswa secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian awal yaitu analisis kebutuhan untuk pengembangan sebuah model pembelajaran. Dalam hal ini menguraikan materi-materi apasajakah yang relevan diberikan di perguruan tinggi yang mampu meningkatkan inklusi pajak bagi generasi muda. Penelitian ini melibatkan praktisi dalam hal ini dosen pengampu perpajakan ataupun konsultan pajak, untuk menganalisis materi-materi yang relevan diberikan kepada mahasiswa untuk membangun kompetensi inklusi pajak bagi mahasiswa ekonomi dan non ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini menganalisis kompetensi inklusi pajak serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di perguruan tinggi, yang ditinjau dari perspektif praktisi.

**2. Landasan Teori**

**2.1 Inklusi Pajak**

Program inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, khususnya calon pembayar/wajib pajak, melalui penyisipan materi perpajakan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan paling rendah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak  dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan (Setiono, 2019). Terdapat 7(tujuh) manfaat inklusi pajak : Pertama, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di Indonesia. Kedua, inklusi pajak relevan dalam sistem self-assessment. K*etiga*, inklusi pajak sebagai langkah antisipatif dalam rangka menyambut bonus demografi. *Keempat*, inklusi pajak bisa jadi solusi jangka panjang dalam menjamin kepatuhan pajak pekerja di sektor nonstandar yang mulai marak dewasa ini. *Kelima*, edukasi pajak merupakan salah satu dari empat elemen dasar jaminan sistem pajak yang ideal dan memenuhi ekspektasi masyarakat. *Keenam*, inklusi pajak menstimulus ketertarikan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia unggul di bidang pajak. *Ketujuh*, inklusi pajak menjadi bagian tidak terpisahkan dari momentum reformasi pajak. Keberhasilan agenda reformasi pajak Indonesia 2017-2020 yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak (Darussalam, 2019)

**2.2 Inklusi Pajak di Perguruan Tinggi**

Program inklusi pajak di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dalam beberapa strategi antara lain: (1) strategi dalam kurikulum, (2) strategi dalam pembelajaran, (3) strategi dalam perbukuan, dan (4) strategi dalam kegiatan di luar proses belajar mengajar. Inklusi melalui kurikulum adalah pendekatan integrasi materi kesadaran pajak melalui seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Di perguruan tinggi pengembangan kurikulum mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk itu pengembangan inklusi pajak di perguruan tinggi hendaknya mengacu pada KKNI disamping PT memiliki otonom tersediri untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi dan misi masing-masing universitas. Selanjutnya inklusi melalui pembelajaran merupakan integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa, serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran yang didukung dengan sumber belajar seperti buku atau sumber yang lain. Strategi berikutnya adalah startegi dalam perbukuan. Strategi dalam perbukuan menggunakan pendekatan integrasi nilai-nilai kesadaran pajak dalam buku ajar, buku refrensi dan buku panduan guru. Nilai-nilai kesadasaran pajak dalam buku ajar, diintegrasikan dalam topik yang sesuai dengan bahasan. Selain buku ajar, nilai-nilai kesadaran pajak juga diwujudkan dalam penyediaan buku yang secara kkhusus membahas tentang nilai-nilai kesadaran pajak. Pada tahun 2016 DJP telah menerbitkan Buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi. Buku ini dapat diunduh pada laman htpp:edukasi.pajak.go.id. Buku ini dirancang sebagai salah satu bahan literasi bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini. Selain itu buku ini juga dapat digunakan oleh dosen yang mengampu Mata Kuliah Waijb Umum dalam memberikan kesadaran pajak. Strategi inklusi yang terakhir adalah strategi dalam kegiatan di luar proses belajar mengajar. Dalam strategi ini dipentingkan adanya upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak melalui kegiatan di luar perguruan tinggi, seperti seminar, program kreatifitas mahasiswa, olimpiade perpajakan, lomba menulis, kegiatan kepramukaan dan kegiatan lainnya (Edukasi.pajak.go.id, 2016b)

**2.3 Kompetensi inklusi pajak dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi**

Pembaharuan pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tak pernah henti. Pendidikan dan pembelajaran berbasis kompetensi merupakan contoh hasil perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi atau standar kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2010). (Dantes, 2012) memberikan batasan standar kompetensi yaitu batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Cakupan materi yang terkandung dalam setiap standar kompetensi cukup luas terkait dengan konsep yang ada dalam suatu mata pelajaran. Demikian halnya dengan Kay 1997 dalam (Mulyasa, 2010), menyatakan bahwa kompetensi merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan dasar, keterampilan sikap dan nilai-nilai yang penting untuk berkomptisi di era global dewasa ini.

Kompetensi inklusi pajak dalam penelitian ini, dikembangkan berdasarkan beberapa telaah materi seperti Buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi dan Silabus dalam mata kuliah pengantar perpajakan dan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian (Dianastiti et al., 2020). Adapun kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Memiliki pengetahuan tentang pengertian perpajakan di Indonesia
2. Memiliki pengetahuan mengengai fungsi pajak dan jenis-jenis pajak
3. Memiliki pengatahuan dan keterampilan mengenai praktek pemungutan pajak sehari-hari
4. Memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pajak bagi negara
5. Memiliki pengetahuan mengenai sumber historis dan sosiologis.
6. Memiliki pengetahuan mengenai esensi dan urgensi pajak untuk meningkatkan kesejahteraan
7. Memiliki pengetahuan mengenai realitas pajak dari masa ke masa
8. Memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi tiap masa
9. Memiliki pengetahuan mengenai konsep pajak dalam pembangunan
10. Memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran membayar pajak
11. Memiliki pengetahuan mengenai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam konsep perpajakan
12. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara pembayaran pajak
13. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP serta EFIN
14. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung kewajiban perpajakan
15. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT
16. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai konsep penegakan hukum dalam perpajakan
17. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai prosedur (tata cara) penegakan hukun dalam perpajakan
18. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai konsep hak dan kewajiban WNI dalam membayar pajak yang dihubungkan dengan aktifitas bela negara
19. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai konsep amnesty pajak
20. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami pentingnya amnesty pajak bagi negara
21. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta regulasinya
22. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPn Bm) serta regulasinya
23. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta regulasinya
24. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jenis-jenis pajak dan regulasinya
25. Memiliki pengetahuan mengenai lembaga tempat membayar dan melaporkan pajak

**3. Metode Penelitian**

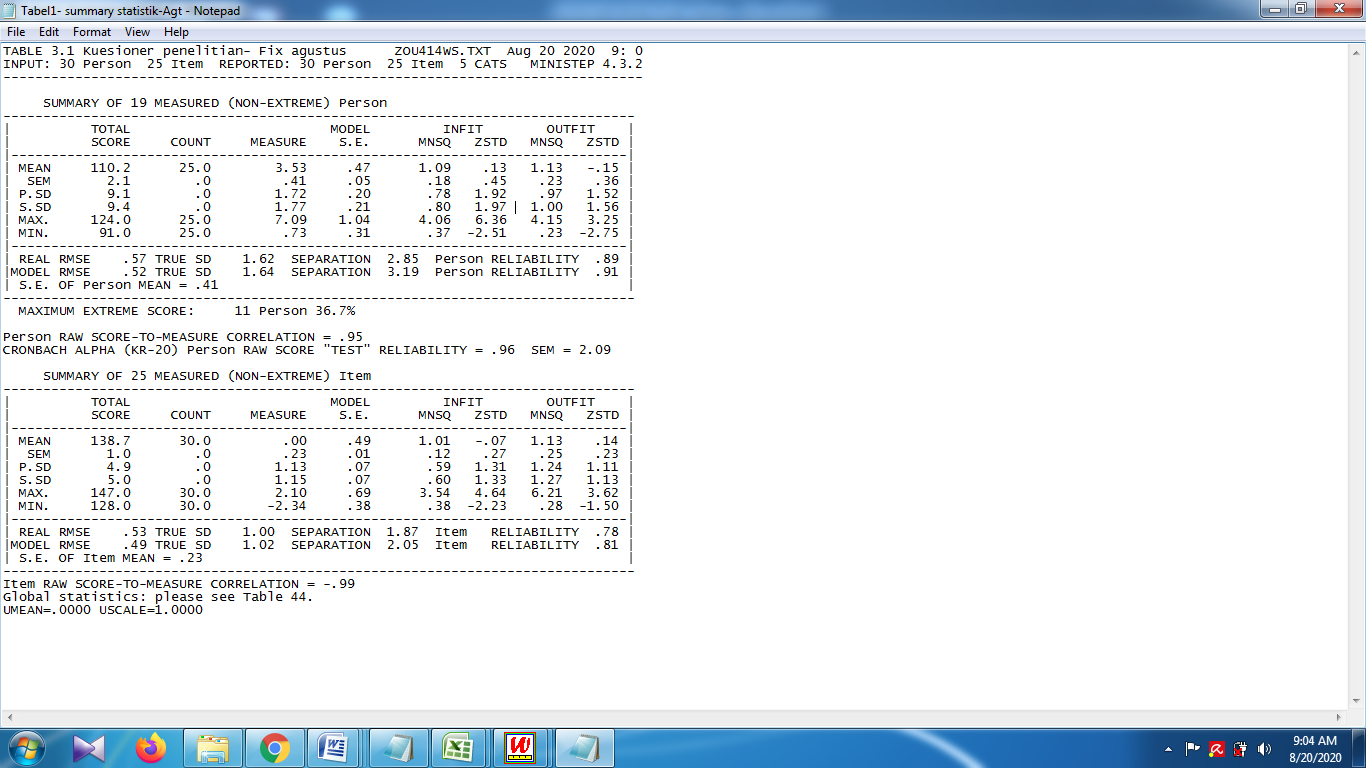
Penelitian ini menggunakan pendekatan *ex post facto*, dengan teknik deskriptif kuantitatif. Pendekatan *ex post facto* dipilih karena penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan secara rinci dan jelas tanpa memanipulasi atau mensimulasi setting penelitian. Dalam hal ini memberikan gambaran secara rinci mengenai kompetensi inklusi pajak di perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan penelitian ini peubah yang akan dianalisis adalah kompetensi inklusi pajak yang ditinjau dari perspektif praktisi perpajakan dalam hal ini dosen dan konsultan pajak. Kompetensi yang akan dianalisis mengacu pada rumusan kompetensi yang dirancang berdasarkan berdasarkan dalam Buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi dan Silabus dalam mata kuliah pengantar perpajakan dan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian (Dianastiti et al., 2020), jumlah butir sebanyak 25 butir. Responden dalam penelitian ini merupakan praktisi perpajakan sejumlah 30 orang. Ukuran sampel ini dianggap layak untuk ujian rintis (*pilot study*) dengan pendekatan kalibarasi aitem model rasch (Sumintono & Widhiarso, 2014). Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, dengan skala likert menggunakan tingat persetujuan (*level of agreement*) yang bergerak dari 5 sampai dengan 1 atau dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Kuesioner dikumpulkan *google form* dengan link https://forms.gle /kcJBmuYs6VkkAayF6. Selanjutnya dalam kuesioner, juga mengungkapkan pertanyaan terkait pendapat responden tentang keterterapan pembalajaran inklusi pajak serta pendapat mereka terhadap hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan inklusi pajak di kalangan mahasiswa. Analisis data menggunakan permodelan rasch dengan paket program (*free* *software*) yaitu ministep.

**4. Hasil dan Diskusi**

Gambaran umum responden dapat jabarkan sebagai berikut. Pertama berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 56% responden berjenis kelamin perempuan dan 44% adalah laki-laki. Selanjutnya sebanyak 40% responden adalah dosen pengampu mata kuliah perpajakan, 40 % merupakan konsultan pajak, dan 20% merupakan dosen perpajakan sekaligus sebagai konsultan pajak. Dilihat dari lama bekerja, sebanyak 64% responden telah bekerja di atas 7 tahun, 20% diantara 4-7 tahun, dan sisanya 1- 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengalaman dalam bidang perpajakan baik sebagai dosen pengajar maupun konsultan pajak.

Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai validitas dan reliabilitas instrumen dengan menggunakan model rasch. Model ini digunakan untuk menentukan apakah kompetensi yang telah disusun dalam kuesioner memenuhi kriteria dari sebuah butir ideal, yang dapat dimaknai sebagai kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran inklusi pajak di perguruan tinggi. Hasil pengujian model rasch dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.

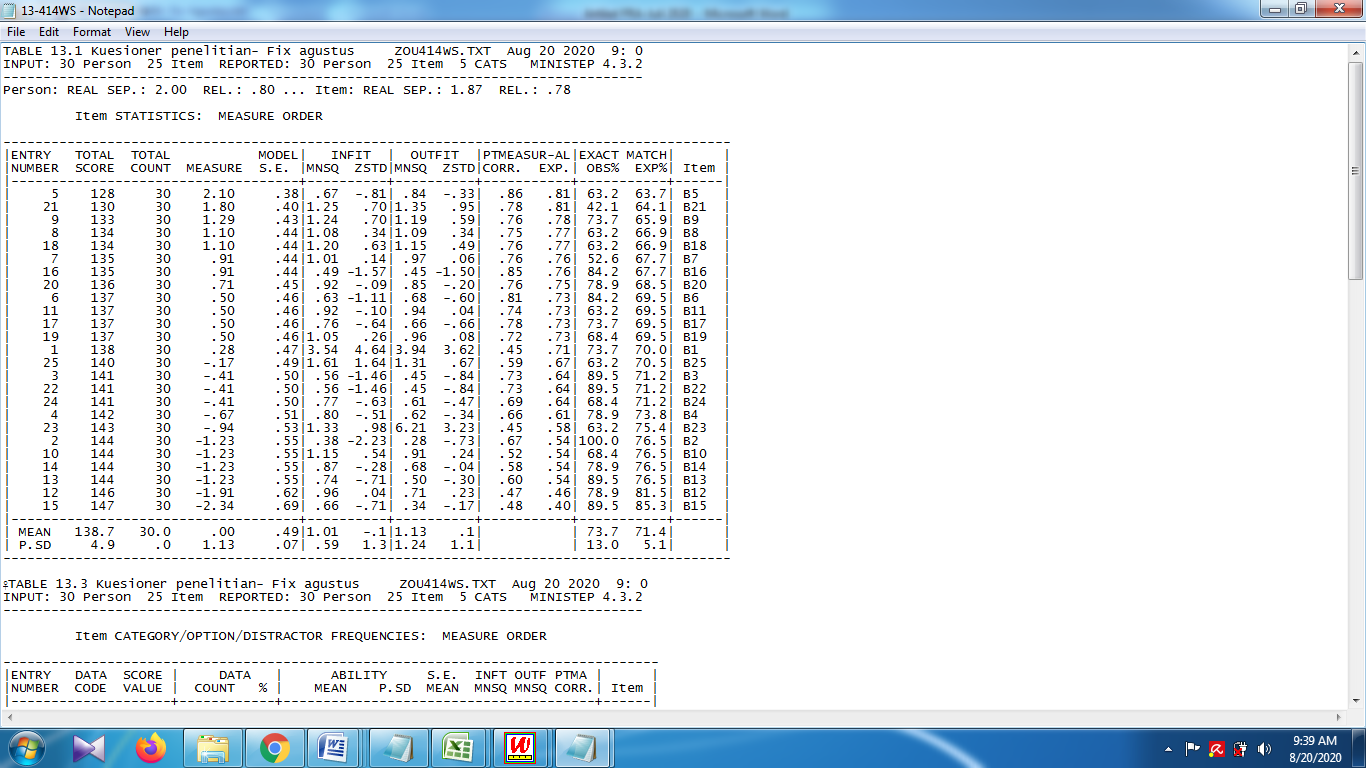
Tabel 1 Summary Statistics



Data dalam tabel 1 di atas memberikan info secara keseluruhan tentang kualitas responden maupun kualitas instrumen yang digunakan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut (Sumintono & Widhiarso, 2014). Pertama, *person measure* sebesar +3,53 logit yang menunjukkan rata-rata nilai responden dalam kuesioner kompetensi inklusi pajak. Nilai rata-rata yang lebih dari logit 0,0 menunjukkan kecenderungan responden yang lebih banyak menjawab setuju pada statement di berbagai butir (item). Kedua, nilai *aplha cronbach* yang digunakan untuk mengukur reliabilitas atau interaksi antara person dan butir secara keseluruhan sebesar 0,96 > 0,8, yang dapat dimaknai bahwa reliabilitas instrumen sangat baik. Ketiga, nilai *person reliability* dan *item reliability*. Pada *person reliability* diperoleh nilai 0,89 berada dalam kisaran 0,81 - 0,90 sehingga dapat dikategorikan bagus, atau konsistensi jawaban dari responden adalah bagus. Namun jika dilihat dari *item reliability* memperoleh nilai sebesar 0,78 berada dalam kisaran 0,67 – 0,80, sehingga dapat dikategorikan cukup atau dapat dikatakan kualitas butir-butir dalam instrumen adalah cukup baik. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan kualitas instrumen adalah baik atau dapat dikatakan bahwa kompetensi yang disampaikan dalam butir-buitr instrumen mencerminkan kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran inklusi pajak di PT.

Dalam pemodelan rasch, dapat ditentukan secara langsung butir-butir mana yang mudah disetujui oleh responden dan mana yang sulit disetujui oleh responden. Dalam analisis ini, dapat kita menentukan kompetensi apasajakah yang lebih penting (relevan) diberikan di kalangan mahasiswa, ditinjau dari level persetujuan responden. Semakin banyak responden yang menyetujui suatu item, maka dapat dimaknai semakin relevan kompetensi yang dikembangkan. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam output Tabel 2 yaitu *Item Measurement* sebagai berikut.

Tabel 2 *Item Measurement*



Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat pada kolom *measurement* yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terrendah. Nilai *measurement* dalam hal ini nilai logit item. Untuk B5 dengan +2,10 logit menunjukkan ini adalah butir (item) yang paling sukar disetujui oleh responden dalam instrumen kompetensi inklusi pajak. Sedangkan B15 dengan nilai – 2,34 logit merupakan butir yang paling mudah disetujui. Jika kita urutkan 7 butir yang paling mudah disetujui, atau yang kita maknai sebagai kompetensi yang lebih dibutuhkan dalam pembelajaran inklusi pajak adalah secara berturut-turut yaitu: B15 (pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT), B12 (Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara pembayaran pajak); B13 (Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP serta EFIN) ; B14 (Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung kewajiban perpajakan) ; B10 (Memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran membayar pajak) ; B2 (Memiliki pengetahuan mengengai fungsi pajak dan jenis-jenis pajak) dan B23 (Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta regulasinya). Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kompetensi yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa dalam upaya peningkatan inklusi pajak adalah kompetensi prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP, melakukan proses perhitungan pajak yang harus disetorkan, kemudian tata cara pembayaran pajaknya, dan terakhir yaitu melaporkan kewajiban perpajakannya dalam SPT atau yang sering disebut dengan istilah D-H-B-L (daftar, hitung, bayar, dan lapor). Selain itu, pentingnya kesadaran membayar pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak juga diperlukan untuk meningkatkan inklusi pajak di kalangan mahasiswa.

Selanjutnya hasil kuesioner terkait implementasi/keterterapan pembelajaran inklusi pajak di perguruan tinggi, diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 76% responden menyetujui materi inklusi pajak diberikan pada mata kuliah tersendiri, 12% responden setuju materi inklusi pajak untuk disubstitusikan ke mata kuliah umum (MKU) seperti mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, atau Bahasa Indonesia, dan sisanya sebanyak 12 % materi inklusi pajak diberikan pada kegiatan-kegiatan di luar kurikulum seperti seminar kemahasiswaan, pelatihan perpajakan, atau kegiatan lainnya. Hasil ini dapat dimaknai, bahwa cakupan yang luas terkait materi inklusi pajak membutuhkan mata kuliah tersendiri. Capaian kompetensi yang dituju dapat mengacu pada butir-butir dengan tingkat persetujuan yang tinggi sesuai dengan analisis dalam Tabel 2 di atas. Tentu saja penambahan mata kuliah di setiap prodi dalam universitas memiliki pertimbangan tersendiri. Namun jika dikaitkan dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 yang memberikan hak belajar sebanyak 3 (tiga) semester di luar program studi, memberikan peluang kepada mahasiswa non ekonomi untuk mengambil mata kuliah inklusi pajak yang ditawarkan di program studi ke-ekonomian seperti akuntansi atau manajemen. Penerapan inklusi pajak, juga dapat disubstitusi ke mata kuliah MKU. Tentu saja bobot materinya atau capaian kompetensinya tidak akan bisa sebanyak jika diterapkan dalam mata kuliah tersendiri. Untuk itu kompetensi yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa adalah prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat diutamakan dalam pemilihan materi. Selain itu, pilihan untuk menyampaikan materi inklusi pajak melalui kegiatan di luar kurikulum juga dapat ditingkatkan melalui kegiatan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terukur.

Beberapa saran yang diberikan responden (praktisi) untuk meningkatan inklusi pajak di perguruan tinggi dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, pembelajaran inklusi pajak sebaiknya tidak hanya diberikan di perguruan tinggi, namun diberikan dari mulai usia sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA/SMK. Hal ini diperlukan untuk memberikan doktrin yang kuat tentang pentingnya pajak bagi negara, sehingga nantinya mereka akan menjadi pejuang pembayar pajak. Di perguruan tinggi, pembelajaran pajak harus diseimbangkan antara teori dan praktek. Hal ini disebabkan karena peraturan perpajakan yang dinamis dan adanya perkembangan teknologi di bidang perpajakan seperti E-FIN, E-Billing, E-SPT, dan lainnya. Hal inilah yang harus dijembatani, melalui kegiatan belajar yang mampu mengkolaborasikan antara teori dan praktek perpajakan yang sesungguhnya. Selanjutnya, di perguruan tinggi juga bisa dibentuk sebuah *forum grup discussion* (FGD) atau kelompok penggemar pajak untuk melakukan kegiatan diskusi maupun edukasi perpajakan di kalangan mahasiswa.

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama,* kompetensi yang diperlukan dalam mengimplemntasikan inklusi pajak dapat dilihat dalam butir-butir yang tersusun dalam penelitian ini. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kompetensi yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa dalam upaya peningkatan inklusi pajak adalah kompetensi prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP, melakukan proses perhitungan pajak yang harus disetorkan, kemudian tata cara pembayaran pajaknya, dan terakhir yaitu melaporkan kewajiban perpajakannya dalam SPT atau yang sering disebut dengan istilah D-H-B-L (daftar, hitung, bayar, dan lapor). Selain itu, pentingnya kesadaran membayar pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak juga diperlukan untuk meningkatkan inklusi pajak di kalangan mahasiswa. *Kedua,* hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran inklusi, sebanyak 76 responden menyetujui agar diberikan dalam mata kuliah tersendiri. *Ketiga,* terdapat beberapa saran yang diberikan terkait dengan pembelajaran inklusi pajak antara lain. (1) Pembelajaran inklusi pajak sebaiknya tidak hanya diberikan di perguruan tinggi, namun diberikan dari mulai usia sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA/SMK. Hal ini diperlukan untuk memberikan doktrin yang kuat tentang pentingnya pajak bagi negara, (2) Di perguruan tinggi, pembelajaran pajak harus diseimbangkan antara teori dan praktek serta membentuk sebuah *forum grup discussion* (FGD) atau kelompok penggemar pajak untuk melakukan kegiatan diskusi maupun edukasi perpajakan di kalangan mahasiswa.

**Daftar pustaka**

Anggaraeni, V., Septian, D., & Kristanto, B. (2019). Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018 A B S T R A K. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 15). https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V15I2.5261

Dantes, N. (2012). *Metode Penelitian* (P. Christian, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Darussalam. (2019). Ini 7 Alasan Pentingnya Inklusi Pajak. Retrieved August 19, 2020, from https://news.ddtc.co.id/ini-7-alasan-pentingnya-inklusi-pajak-17931

Dianastiti, F. E., Novitasari, N., & Wati, A. F. (2020). Urgensi Inklusi Pajak pada Mata Kuliah Umum di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Persepsi dan Pemahaman Perpajakan Mahasiswa Universitas Tidar. *Journal of Public Administration and Local Governance*, *4*(1), 65–80. https://doi.org/10.31002/JPALG.V4I1.2394

Edukasi.pajak.go.id. (2016a). Inklusi Kesadaran Pajak. Retrieved August 19, 2020, from https://edukasi.pajak.go.id/tentang-pajak/apa.html

Edukasi.pajak.go.id. (2016b). Strategi Inklusi Kesadaran Pajak. Retrieved August 19, 2020, from https://edukasi.pajak.go.id/strategi-inklusi-kesadaran-pajak.html

Mulyasa, E. (2010). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

News.ddtc.co.id. (2019). Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhannya? Cek di Sini. Retrieved August 18, 2020, from https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page\_y=0

News.ddtc.co.id. (2020). Duh, Kepatuhan Formal Wajib Pajak 2019 Gagal Capai Target. Retrieved August 19, 2020, from https://news.ddtc.co.id/duh-kepatuhan-formal-wajib-pajak-2019-gagal-capai-target-18270

Setiono, J. (2019). Inklusi Pajak: Upaya Membangun Pondasi Kesadaran Pajak Masa Depan | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved August 18, 2020, from https://www.pajak.go.id/id/artikel/inklusi-pajak-upaya-membangun-pondasi-kesadaran-pajak-masa-depan

Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2014). *Aplikasi Model Rasch untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: Trim Komunikata Publisher.